

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Andriyan, Dody Nur. *Buku Ajar Ilmu Negara (sejarah, Teori, dan Filosofi Tujuan Negara)*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.

*Dokumen Rencana Strategis*. Semarang: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2018.

Fauzan, Muhammad. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang : Setara Press, 2020.

*Geografi dan Demografi*. Semarang: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2021.

Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Isharyanto. *Ilmu Negara*. Surakarta : Oase Pustaka, 2016.

Kusnardi & Bintan. R. Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2018.

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 2013.

*Statistik Pelabuhan Perikanan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.

*Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2023*. Semarang: Badan Pusat Statistik, 2023.

Suteki & Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : Grafindo Persada, 2017.

### Jurnal

Simandjuntak, Reynold. "Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7.1, 2015.

Soemarmi, Amiek, Untung Dwi Hananto, and Lucky Cakra Ryandi. "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Pematang." *Diponegoro Law Review* 5.2, 2016.

Wijayanti, Septi Nur. "Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Media Hukum* 23.2, 2016.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Pemerintah Daerah

dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rincian Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

### **Narasumber**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Focus Group Discussion: Potensi Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah. Pati, 2024.

Prastomo, Widie. Wawancara. Semarang: 9 Januari, 2024.

## LAMPIRAN

### A. Surat Izin Riset

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI</b>	<small>Jalan dr. Antonius Suro Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang Kode Pos 50725 Telepon (024) 76918201 Fax (024) 7618215 Laman www.fh.unidp.ac.id E-mail fh@unidp.ac.id</small>
	<b>UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS HUKUM</b>	

Nomor **455** /UN7.F1/AK/XII/2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Riset/penelitian

**19 DEC 2023**

Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah  
Jl. Imam Bonjol No. 134  
Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Amalia Nurhadi  
NIM : 11000120130373  
alamat : Jl. Gondang Raya No 34, Bulusan, Tembalang, Kota Semarang  
nomor HP : 087802970174  
bidang minat : Hukum Tata Negara  
judul skripsi : Pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam Rangka Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

  
Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

## B. Surat Persetujuan Riset



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3546469, 3546607  
Faksimile 024-3551289 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [dkp@jatengprov.go.id](mailto:dkp@jatengprov.go.id)

Nomor : 423.4/117  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Riset / Penelitian

Semarang, 17 Januari 2024  
Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

di -  
Semarang

Menanggapi Surat dari Universitas Diponegoro Fakultas Hukum No 1289/UN7.F1/AK/XI/2023 tanggal 30 November 2023 tentang Permohonan Riset/Penelitian atas nama:

NAMA	NIM	Fakultas	Bidang Minat
Amalia Nurhadi	11000120130373	Hukum	Hukum Tata Negara

Pada prinsipnya kami tidak keberatan siswa Saudara akan melakukan Riset/Penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan mematuhi semua aturan dan jam kerja yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan



Ditandatangani secara elektronik oleh:

DEWI YULIAWATI, SP. M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP 19680703 199203 2 007



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.